**RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DPRD**

**KOTA SERANG**

**TAHUN 2020**

**RENJA**



**RENSTRA**

cove

**RENSTRA**

**KATA PENGANTAR**

**Assalamu’alaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) Tahun dan/atau Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2020, sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakatnya.

Penyusunan Renja – PERANGKAT DAERAH tahun 2020 merupakan tahapan tahun ke 1 (Satu), telah mengalami berbagai perbaikan/penyelarasan yang disesuaikan dengan Renstra – PERANGKAT DAERAH Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Renja – PERANGKAT DAERAH merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Renstra – PERANGKAT DAERAH.

Dalam Penyusunan Renja – PERANGKAT DAERAH ini kami sadari masih jauh dari kesempurnan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kota Serang dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Semoga dengan pendekatan Perencanaan Tahunan yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kota Serang dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagi perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

**Wassalamua’alaikum Wr. Wb**

Serang, Juli 2019

Sekretaris DPRD Kota Serang

**MOH. MA’MUN CHUDARI, SE**

NIP. 19631203 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI RECANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 32

2.3 ISU ISU PENTING PENEYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH 37

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERAGKAT DAERAH 59

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 59

3.2 TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 69 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 75

BAB IV RENCANA KERJA DAN PNDANAAN PERANGKAT DAERAH…………93

BAB V PENUTUP……………………………………………………………………… 96

Lampiran : 122

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang tahun 2019-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Dengan demikian, Renja Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2020 juga merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan di bidang pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Penyusunan program jangka menengah ini disusun berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memiliki dampak besar terhadap upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2019-2023 merupakan penjabaran bagian dari RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 khususnya penjabaran Misi ke-4 Kota Serang yaitu :

*“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*

Penyusunan Rencana Kerja Sekreatriat DPRD Kota Serang memuat rencana program dan kegiatan untuk tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2020 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kota Serang Tahun 2020. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang ini akan dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4663);
12. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
18. Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang.
19. Peraturan Daerah Kota Serang nomor … Tahun 20019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019-2023;

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kotaSerang Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekreatariat DPRD Kota Serang dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 1 tahun kedepan dan sebagai implementasi Visi dan Misi Renstra DPRD Kota Serang.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRDmendasarkan pada dokumen yang telah disusun dalam Program dan Kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat terhadap tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2020, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang.
  2. Landasan Hukum.
  3. Maksud dan Tujuan.
  4. Sistematika.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra PERANGKAT DAERAH.

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD.

2.5 Penalaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Penalaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap satu program urusan wajib, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja maupun anggaran kegiatan-kegiatan urusan wajib pada tahun 2019 maupun 2020 dapat dicapai dengan baik. Pada tahun 2019, rata-rata capaian kinerja dan anggaran kegiatan urusan wajib berturut-turut adalah sebesar 96,34% dan 96,31%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD memiliki predikat kinerja yang sangat tinggi.

**2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Serang berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang diterapkan dalam RPJMD 2008-2013, sedangkan dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2020 terdapat beberapa Indikator Kinerja. Ada indikator kinerja yang tambah, ada pula yang menerus, berdasarkan kebutuhan saat itu, adapun Indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2008 – 2013 seperti diperlihatkan pada tabel 3, sedang Pencapaian perencanaan anggaran dan realisasi Kinerja Sekretariat DPRD diperlihatkan pada tabel 4

TABEL 3 :Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi | Target | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| **A** | **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | - | 51.683.898 | - |  |  |  | 51.648.898 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Telepon | 211.000.000 | 18.000.000 | 195.374.851 | 222.000.000 | 220.000.000 | 138.022.793 | 123.535.429 | 195.374.851 | 181.763.864 | 102.424.741 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Pelayanan Asuransi Kesehatan Bagi Anggota DPRD dan Keluarga | 259.540.000 | 492.405.250 | 624.032.600 | 563.969.200 | 1.113.680.000 | 251.161.600 | 491.573.000 | 624.032.600 | 388.574.300 | 1.079.540.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terpeliharanya Kebersihan Kantor | 103.264.900 | 181.468.450 | 256.173.000 | 222.435.000 | 156.570.000 | 102.339.750 | 169.938.250 | 256.173.000 | 218.368.650 | 114.252.698 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terssedianya Alat Tulis Kantor | 90.679.038 | 93.177.406 | 165.914.000 | 87.749.000 | 97.500.000 | 89.765.000 | 93.177.360 | 165.914.000 | 87.301.000 | 93.902.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tesedianya Cetakan dan Penggandaan | 101.745.070 | 165.416.405 | 198.278.000 | 175.275.000 | 123.360.000 | 100.478.800 | 165.365.000 | 198.278.000 | 174.713.500 | 106.575.935 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Komponen Listrik | 31.855.864 | 37.272.978 | 51.477.000 | 75.831.000 | 50.635.000 | 29.167.182 | 32.221.000 | 51.477.000 | 74.520.000 | 30.581.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | 179.105.500 | 1.042.619.000 | 478.648.200 | 641.980.000 | 210.820.000 | 158.494.000 | 1.005.615.000 | 478.648.200 | 626.166.050 | 206.268.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Peralatan Rumah tangga lengkapdan memadai | 20.425.350 | 20.421.750 | 37.867.100 | 24.137.000 | - | 20.424.000 | 19.940.000 | 37.867.100 | 24.137.000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meningkatkan Wawasan Anggota DPRD Kota Serang | 61.040.000 | 97.560.000 | 106.245.000 | - | - | 61.040.000 | 97.560.000 | 106.245.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terpenuhinya Jamuan Rapat dan Tamu | 323.555.000 | 462.290.000 | 702.699.000 | 911.210.000 | 845.245.000 | 316.205.000 | 452.090.000 | 702.699.000 | 853.791.000 | 503.659.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Komsultasi dalam dan Luar Daerah | 648.120.000 | 863.286.100 | 952.029.219 | 1.519.850.000 | 894.165.000 | 684.080.000 | 863.285.000 | 952.029.219 | 1.485.622.500 | 573.863.860 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terjaganya Keamanan Kantor Sekretariat DPRD Kota Serang | 161.050.000 | 213.400.000 | 322.105.000 | 328.505.000 | 318.505.000 | 86.850.000 | 186.620.000 | 322.105.000 | 301.332.000 | 168.400.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tersedianya Sarana Dan Aparatur |  |  | Terpenuhinya Sarana Penunjang Kegiatan DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terpeliharanya Gedung Kantor | - | 214.325.000 | 291.288.000- | - | 181.480.000 | 95.248.000 | 212.638.000 | 291.288.000 | 176.286.000 | 112.946.100 |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  | Terpelihatanya Kendaraan Dinas dan Oprasional | 945.280.000 | 287.815.000 | 381.935.000 | 673.933.200 | 633.830.000 | 96.045.100 | 178.059.500 | 381.935.000 | 606.249.300 | 392.772.850 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terpeliharanya Perlengkapan Kantor | - | 65.850.000 | 53.500.000 | 69.700.000 | 24.390.000 | - | 61.560.000 | 53.500.000 | 69.350.000 | 14.374.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terpeliharanya Peralatan Kantor | 55.750.000 | 23.830.000 | 55.050.000 | 150.200.000 | 58.353.570 | 54.325.000 | 15.830.000 | 55.050.000 | 142.897.600 | 35.208.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Terlaksananya Kerjasama Informasi dengan Media Massa |  |  | Terdokumentasinya setiap Berita -berita yang berkembang di masyarakat | 58.164.000 | 57.634.800 | - | 550.112.700 | 29.150.000 | 58.159.000 | 57.164.000 | 40.980.100 | 33.117.950 | 2.835.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersosialisasi dan terbupliksinya informasi program pemerintah dan pembangunan secara utuh kepada masyarakat | 51.200.000 | 89.800.000 | - | 38.407.950 | 620.570.000 | 51.200.000 | 89.300.000 | 200.150.000 | 491.477.600 | 325.366.700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Meningkatnya Kelembagaan Perangkat Daerah |  |  | Tersusunnya Renstra | - | 222.650.400 | 40.383.500 | - | - | - | 217.216.800 | 40.383.500 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersusunnya Rencana Kerja | - | - | 101.634.850 | 262.173.500 | 57.010.000 | - | - | 101.634.850 | 247.918.500 | 48.958.995 |  |  |  |  |  |
| 5 | Berkembangnya Komunikasi, informasi dan media masa |  |  | Meningkatnya layanan terhadap pimpinan | 24.905.000 | 168.650.000 | - |  | - | 24.904.000 | 167.582.500 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| **B** | **PENYELENGGARAAN LAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |  |  | Ditetapkannya peraturan daerah dan Keputusan DPRD | 1.593.164.300 | 4.143.880.450 | 5.628.060.150 | 7.124.612.750 | 6.465.261.500 | 1.557.394.300 | 4.110.473.240 | 5.544.063.330 | 6.045.126.950 | 3.724.883.635 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tertampungnya berbagai Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat | 98.140.000 | 98.140.000 | 165.428.900 | 67.965.000 | 126.103.500 | 97.954.500 | 98.140.000 | 155.055.000 | 36.362.500 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya kinerja alat Kelengkapan DPRD | 2.403.835.000 | 4.091.050.000 | 6.279.970.000 | 6.971.721.700 | 4.379.622.500 | 2.148.305.000 | 4.078.550.000 | 5.822.604.000 | 6.826.898.030 | 1.620.998.560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Terlakananya Rapat-rapat Paripurna DPRD | 269.095.000 | 184.045.000 | 275.252.000 | 390.547.500 | 336.677.500 | 189.169.500 | 113.525.000 | 219.724.500 | 336.073.000 | 125.967.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tercapainya Koordinasi Permasalahan dan terserapnya Aspirasi Masyarakat dalam masa reses | 151.616.000 | 1.458.485.000 | 1.887.896.000 | 2.375.127.000 | 1.722.755.000 | 135.760.500 | 1.458.485.000 | 1.887.895.950 | 2.311.493.250 | 857.427.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meningkatanya kinerja dan wawasan Pimpinan dan anggota DPRD | 1.099.660 | 1.566.680.000 | 1.658.293.000 | 2.803.756.300 | 2.998.057.800 | 1.063.915.000 | 1.458.990.000 | 1.459.751.900 | 2.038.020.000 | 1.162.295.650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meningkatanya kinerja Anggota DPRD tentang Peraturan Perundang-undangan |  | 1.906.035.000 | 2.055.072.800 | 3.277.697.200 | 2.328.390.000 | 805.823.650 | 1.902.625.000 | 1.721.692.800 | 2.887.358.950 | 1.370.250.194 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersunsunya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | - | - | - |  | 949.872.500 | - | - | - | - | 388.985.500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersunsunya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | 478.652.500 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tersunsunya Renja DPRD | 39.316.736 | 47.785.000 | 29.180.000 | - | 387.972.500 | 35.653.000 | 47.785.000 | 29.180.000 | - | 334.702.500 |  |  |  |  |  |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019-2023 sebagaimana yang digambarkan pada Tabel 3 selanjutnya dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rasio anggaran dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang.

Untuk memberikan gambaran Sekretariat DPRD Kota Serang rasio anggaran dan realisasi anggaran pada pelaksanaan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019-2023 berikut disajikan dalam bentuk tabel 4 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai berikut.

Tabel 4 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Serang

| Uraian Kewenangan Sekretariat DPRD | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun ke- | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendapatan Asli Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Hasil pajak daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Hasil retribusi daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Lain-lain PAD yang Sah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana Perimbangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Dana alokasi umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Dana alokasi khusus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Pendapatan hibah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Dana darurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Dana penyesuaian dan otonomi khusus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELANJA DAERAH |  | 20,745,606,309 | 26,815,488,072 | 33,480,708,658 | 36,708,276,614 |  | 18,986,925,650 | 24,957,963,767 | 30,242,668,553 | 33,396,038,020 |  | 94% | 93% | 90% | 91% |  |  |
| Belanja tidak langsung |  | 1,463,869,622 | 1,822,367,772 | 2,065,778,308 | 2,254,632,344 |  | 1,463,869,622 | 1,822,367,772 | 2,065,778,308 | 2,254,632,344 |  | 237% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| -  Belanja pegawai |  | 1,463,869,622 | 1,822,367,772 | 2,065,778,308 | 2,254,632,344 |  | 1,463,869,622 | 1,822,367,772 | 2,065,778,308 | 2,254,632,344 |  | 237% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| -  Belanja bunga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Belanja subsidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Belanja hibah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Belanja bantuan sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Belanja tidak terduga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja langsung |  | 19,281,736,687 | 24,993,120,300 | 31,414,930,350 | 34,453,644,270 |  | 18,043,650,250 | 23,633,113,586 | 29,070,985,602 | 30,551,414,001 |  | 97% | 95% | 93% | 89% |  |  |
| -  Belanja pegawai |  | 2,998,855,400 | 2,312,043,000 | 2,350,065,000 | 3,262,670,000 |  | 1,998,855,400 | 1,865,205,481 | 2,201,203,251 | 3,015,402,019 |  | 67% | 81% | 94% | 92% |  |  |
| -  Belanja barang dan jasa |  | 15,117,845,537 | 22,031,871,200 | 28,005,843,350 | 31,015,084,270 |  | 17,100,374,850 | 22,308,263,405 | 27,899,302,651 | 27,706,789,982 |  | 117% | 101% | 100% | 89% |  |  |
| -  Belanja modal |  | 1,165,035,750 | 649,206,100 | 1,059,022,000 | 175,890,000 |  | 1,055,580,000 | 540,355,300 | 1,029,520,300 | 170,778,000 |  | 91% | 83% | 97% | 97% |  |  |
| PEMBIAYAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penerimaan pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya |  | 585.095.659 | 1.855.504.305 | 3.238.040.105 | 3.312.238.594 |  | 20.122.610.650 | 24.906.803.767 | 30.242.668.553 | 33.369.038.020 |  | 97% | 93% | 90% | 91% |  |  |
| -  Pencairan dana cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Penerimaan pinjaman daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Penerimaan kembali pemberian pinjaman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Penerimaan piutang daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengeluaran pembiayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Pembentukan dana cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Pembayaran pokok utang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  Pemberian pinjaman daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Total* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi/ Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Serang dimaksud selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan pelayanan juga untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Serang.

Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi pelayanan PERANGKAT DAERAH Sekretariat DPRD dimasa lampau serta kecenderungan dimasa depan, isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Serang terutama dalam memberikan dukungan dan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah :

1. Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Walikota belum menggunakan tim penilai/tim appraisal;
2. Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;
3. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;
4. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.

Dalam penentuan isu strategis ini Set-DPRD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Set-DPRD Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

* + 1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis pertama tentang Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan Permasalahan pokok : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
    2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, pada Isu strategis Tata kelola pemerintahan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Dewan Kota Serang dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan DPRD dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

* 1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD disebabkan tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD menjadi tinggi.
  2. Masih perlu ditingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  3. Prasarana dan Sarana yang masih terbatas.
  4. Pengelolaan Manajemen Aset dan Manajemen Data yang masih belum optimal.
  5. Aspirasi dan Respon Masyarakat yang begitu luas dan berkembang cepat perlu penanganan dengan baik.

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka dapat dirumuskan isu strategis Sekretariat Dewan Kota Serang, Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15 ISU STRATEGIS



Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan SET DPRD Kota Serang lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

* 1. Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar melalui Perencanaan kebutuhan layanan DPRD, Perbaikan manajemen Aset dan pemeliharaan yang terjadwal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang.
  2. Peningkatan Jaring aspirasi masyarakat melalui peningkatan fungsi kehumasan dan publikasi kebijakan DPRD, Peningkatan fasilitasi temu muka dan kualitas keprotokolan DPRD.
  3. Peningkatan Kinerja Keuangan melalui keselarasan rencana kerja dan penggunaan anggaran, kualitas perencanaan, Penganggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Pelaporan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Kota Serang
  4. Peningkatan Kualitas Persidangan dan Risalah melalui Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD, Pemenuhan alat kelengkapan DPRD, Pengesahan PERDA dan dokumen tepat waktu serta Evaluasi dan Rekomendasi.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2020 khususnya yang menyangkut program kerja terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD, Sekretariat DPRD meminta masukan sekaligus analisis kebutuhan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan dan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

**2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Mengingat urusan OPD Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib pemerintahan, artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir dan menjadi salah satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Serang tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun reses DPRD dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan arah kebijakan RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023, Tahun 2020 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi kerakyatan yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kota Serang, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Kota Serang diprioritaskan kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap goncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi pendukung.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka ASN dan Anggota DPRD Kota Serang diharapkan mampu merumuskan program kerja (Renja) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan mempedomani Nawa Cita Presiden. DPRD Kota Serang sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan dan fungsinya dengan baik dan efisien, terutama dalam menuangkan dan memperjuangkan Pokir (Pokok Pikiran) Dewan dalam perumusan dan Pembahasan APBD.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

**A. Tujuan**

Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Serang maka ditetapkan tujuan Renja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

**B. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal;
2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal.

**C. Strategi**

Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strateti merupakan respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi pencapaian tujuan dan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran unsur Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan teknis kepada DPRD;
3. Mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan formal kepada ASN dilingkungan Sekretariat DPRD;
4. Mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5. Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang tersedia;
   1. **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Serang serta pertimbangan atas pelaksanaan/review atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Tahun 2019 maka ditetapkan program prioritas Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR**
2. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik;
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
11. **PROGRAM PENGELOLAAN DANPELAPORAN KEUANGAN**
12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran
13. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14. **PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIANKINERJA**
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
17. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
18. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
19. Pembahasan rancangan peraturan daerah
20. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
21. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
22. Rapat-rapat paripurna
23. Kegiatan Reses
24. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
25. Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ
26. Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD
27. Penyusunan Program Tahunan DPRD
28. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
29. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

Sehingga pada Tahun Anggaran 2020 Program Prioritas Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Serang sebanyak 4 (Empat) Program dan terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Kegiatan. Perumusan program kerja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada analisis tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan DPRD, analisis atas visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023.

Kebijakan Propinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementrian Dalam Negeri, yaitu :

**VISI** ”BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Banten Mendukung pada Misi ke-1 Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu : “**Menciptakan Tata kelola Pemerintah yang Baik** (Good Governance)”

Sedangkan Misi Pemerintah Propinsi Banten, yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dengan demikian Sekretariat Dewan Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta strategi dan arah kebijakan renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Pemerintah Provinsi Banten.

Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pelayanan Fungsi DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah :

* 1. Perlu ditingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Serang dalam melihat tuntutan terhadap tugas dan fungsi DPRD
  2. Menejemen Pengelolaan Manajemen Aset dan Manajemen Data perlu ditingkatkan
  3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi-fungsi DPRD sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi
  4. Perlu ditingkatkan sinergitas perencanaan pembangunan antara eksekutif dan legislatif
  5. Perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam melihat permasalahan dan mencari solusi

Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah :

* 1. Dukungan regulasi dalam pelaksanaan fungsi DPRD
  2. Dukungan teknologi dalam Manajemen Aset dan Data
  3. Dukungan struktural terhadap peningkatan pelayanan DPRD
  4. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pelaksanaan Pembangunan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama OPD** | **Persentase**  **Anggaran untuk TPB** | **Isu Strategis** |
| Sekretariat Daerah | 5,04% | 1. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama te rhadap  keadilan bagi semua |
| Sekretariat DPRD | 4,44% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat |
| Inspektorat | 39,87% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat |
| Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan | 6,21% | 1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif  2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar  3. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan  4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi |
| Dinas Kesehatan | 38,72% | 1. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap p elayanan  kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang  2. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun  3. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang  disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula |

Tabel 14 : Capaian Persentase Anggaran dan Isu Strategis Perangkat Daerah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000  5. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya  6. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan  7. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,  memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro  8. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup  9. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan |
| Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang | 0,47% | 1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro  2. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air  3. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan,  lahan basah, sungai, air tanah, dan danau  4. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi |
| Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman | 33,19% | 1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk  penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan  2. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara  3. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro  5. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan  menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 39,68% | 1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun |
| Dinas Sosial | 39,84% | 1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia,  yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional  2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan  3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,  memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro  4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana  5. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak  6. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk  semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan  7. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional  8. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan |
| Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi | 24,31% | 1. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan  2. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya  3. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan  4. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknolo gi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya  5. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua  pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan  berbahaya  6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya  7. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar |
| Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 34,12% | 1. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan  laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya   1. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,   kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan  menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan  3. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional  4. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan  penggunaan alkohol yang membahayakan  5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut |
|  |  | 6. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun  7. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun |
| Dinas Lingkungan Hidup | 21,81% | 1. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan  memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota  2. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali  3. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi  pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan  4. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan  meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global  5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat  6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau  7. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global  8. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena  penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.  9. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing  10. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional  11. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif |
| Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil | 7,11% | 1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,  memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan |
|  |  | 2. kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro  2. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran |
| Dinas Perhubungan | 5,05% | 1. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua |
| Dinas Komunikasi dan  Informatika | 9,28% | 1. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global |
| Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu  Pintu | 3,63% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat |
| Dinas Pariwisata,  Kepemudaan dan Olahraga | 5,91% | 1. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang  menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal |
| Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan | 4,11% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat |
| Dinas Pertanian | 26,46% | 1. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan  gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula  2. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan  3. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan,  lahan basah, sungai, air tanah, dan danau  4. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya |
| Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 11,73% | 1. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan  2. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya  3. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap  perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua  4. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya  5. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7%  pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang  6. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang  7. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali  lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020 |
| Badan Perencanaan dan  Pembangunan Daerah | 29,16% | 1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional  2. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya  3. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan  4. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua  5. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7%  pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang  6. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua  7. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional  8. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun  9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan  10. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya  11. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns,  dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang |
| Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah | 20,05% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat  2. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya |
| Badan Kepegawaian dan  Pengembangan Sumber  Daya Manusia | 30,05% | 1. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua  tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat  2. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan |
| Badan Pelayanan Pengadaan  Barang/Jasa | 16,27% | 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat |

Tabel 16 **Indikator Pelayanan Perangkat Daerah** **Sekretariat DPRD Kota Serang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BIDANG** | **TUJUAN/ SASARAN** | | **INDIKATOR TUJUAN** | **SATUAN** | **Realisasi 2018** | **Kinerja tahun dasar** | **Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2019- 2023)** | | | | | **AKHIR RPJMD 2023** | **OPD PENANGGUNG JAWAB** | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **URUSAN** | **INDIKATOR SASARAN** | 2018 | Target | Target | Target | Target | Target | Target |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *10* |  | *11* | *12* | *14* | *16* | *18* | *20* | *22* | *23* | *24* |
| **21** | **Pemerintahan Umum** | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD | | **Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** | % | 94.46 | 94.46 | 94.96 | 95.46 | 95.96 | 96.46 | 96.96 | 97 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
|  |  |  | Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Capaian Perda yang dibahas | Jml |  | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | KEPALA |  |
|  |  |  | Indeks Kepuasan Anggota DPRD | % |  | NA | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |  |  |
|  |  |  | Capaian laporan Pengesahan Dokumen keuangan tepat waktu | % |  | 85 | 85.5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |  |  |
|  |  |  |  | Hasil Evaluasi LKjIP | Skor | cc |  | B | B | B | B | B | B |  |  |

**Rencana Program dan Kegiatan**

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Serang 2019-2023.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Indikator Program (1) tersebut; **Capaian Pemenuhan Sarana prasarana** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
3. Pengadaan tanah dan gedung OPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Program (2) tersebut; **Tingkat Kehadiran aparatur** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas aparatur
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Indikator Program (3) tersebut;

* **Persentase kesesuaian pencatatan aset dengan keberadaan fisiknya**
* **Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah**

dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Laporan Pengelolaan barang milik daerah

Indikator Program (4) tersebut; **Capaian Kebijakan strategis DPRD yang dipublikasikan** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Dokumen Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

Indikator Program tersebut ; **Capaian kualitas perencanaan Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja

Indikator Program tersebut; **Capaian Akuntabilitas Kinerja PD (LKjIP PD)** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
2. Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan semesteran serta prognosis
3. Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Indikator Program (1) tersebut ; **Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Dokumen Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
2. Dokumen Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
3. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4. Dokumen Penyusunan Program tahunan DPRD
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar daerah

Indikator Program (2) tersebut; **Capaian kinerja persidangan dan Risalah** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Dokumen Rapat-rapat paripurna
2. Kegiatan Reses
3. Dokumen Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Indikator Program (3) tersebut; **Capaian Pembahasan Perda yang ditangani** dengan indikasi kegiatansebagai berikut :

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ
3. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD

Selanjutnya terlampir Matrik yang berisikan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan indikatif anggaran, pada

Tabel 18 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tabel 18 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

| **NO** | **BIDANG** | **TUJUAN/ SASARAN** | | **INDIKATOR TUJUAN** | **KODE REKENING** | | | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | **INDIKATOR PROGAM (OUTCOME)** | | | **SATUAN** | **Realisasi 2018** | **Kinerja tahun dasar** | **Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2019- 2023)** | | | | | | | | | | **AKHIR RPJMD 2023** | **OPD PENANGGUNG JAWAB** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| **URUSAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)** | | | 2018 | Target | Rp/Jt | Target | Rp/Jt | Target | Rp/Jt | Target | Rp/Jt | Target | Rp/Jt | Target |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  |  |  |  |  | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |  | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **21** | **Pemerintahan Umum** | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan DPRD | | **Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **%** | **94.46** | **54,331,658,875** | **94.96** | **70,775,825,699** | **95.46** | **74,314,616,984** | **95.96** | **81,746,078,682** | **96.46** | **89,920,686,550** | **96.96** | **98,912,755,205** | **97** | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
|  |  |  | Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Capaian Perda yang dibahas |  |  |  |  |  |  |  | | | Jml |  | 13 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | KEPALA |  |
|  |  |  | Indeks Kepuasan Anggota DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | NA | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  |  |
|  |  |  | Capaian laporan Pengesahan Dokumen keuangan tepat waktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 85 | 85.5 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 89 |  |  |
|  |  |  |  | Hasil Evaluasi LKjIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skor | cc |  | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur |  |  |  |  |  |  |  | **22,456,673,909** |  | **21,163,550,014** |  | **23,279,905,015** |  | **25,607,895,517** |  | **28,168,685,069** |  | Ka.Bag Umum |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* |  |  | 1 | Capaian Pemenuhan Sarana prasarana | | % |  | 86 | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Tingkat kehadiran aparatur | | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Persentase kesesuaian pencatatan aset dengan keberadaan fisiknya | | % |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah | | % |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Capaian Kebijakan strategis DPRD yang dipublikasikan | | % |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Umum dan Rumah Tangga** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasubag Umum dan Rumah Tangga |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *1* | Pengadaan sarana dan prasarana kantor |  | 1 | Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kantor | Pkt |  | 12 | 12 | 4,933,568,430 | 12 | 3,888,034,600 | 12 | 4,276,838,060 | 12 | 4,704,521,866 | 12 | 5,174,974,053 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *2* | Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor |  | 2 | Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor | Bln |  | 12 | 12 | 1,728,016,500 | 12 | 2,286,800,000 | 12 | 2,515,480,000 | 12 | 2,767,028,000 | 12 | 3,043,730,800 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *3* | Pengadaan tanah gedung OPD |  | 3 | jumlah Pengadaan tanah gedung OPD | Pkt |  | 1 | 1 | 3,352,312,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *4* | Pengelolaan barang milik daerah |  | 4 | jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah | Dok |  | 6 | 6 | 68,523,000 | 6 | 164,540,000 | 6 | 180,994,000 | 6 | 199,093,400 | 6 | 219,002,740 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *5* | Penyediaan makanan dan minuman |  | 5 | jumlah Penyediaan makanan dan minuman | Bln |  | 11 | 11 | 1,205,697,570 | 11 | 1,589,415,400 | 11 | 1,748,356,940 | 11 | 1,923,192,634 | 11 | 2,115,511,897 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian** | | | |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *6* | Pelayanan administrasi perkantoran |  | 1 | Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran | Bln |  | 12 | 12 | 3,989,590,422 | 12 | 4,431,049,275 | 12 | 4,874,154,203 | 12 | 5,361,569,623 | 12 | 5,897,726,585 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *7* | Peningkatan Kapasitas aparatur |  | 2 | Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur | kali |  | 8 | 9 | 1,148,332,500 | 10 | 1,263,165,750 | 11 | 1,389,482,325 | 12 | 1,528,430,558 | 13 | 1,681,273,613 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *8* | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |  | 3 | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Bln |  | 12 | 12 | 4,597,792,800 | 12 | 5,964,420,439 | 12 | 6,560,862,483 | 12 | 7,216,948,731 | 12 | 7,938,643,604 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Humas dan Protokol** | | | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Kasubag Humas dan Protokol |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *01* | *0* | *9* | Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi PERANGKAT DAERAH |  | 2 | Jumlah dokumen Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi PERANGKAT DAERAH | dok |  | 1 | 1 | 1,432,840,500 | 3 | 1,576,124,550 | 3 | 1,733,737,005 | 3 | 1,907,110,706 | 3 | 2,097,821,776 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program pengelolaan dan Pelaporan Keuangan |  |  |  |  |  |  |  | **97,851,600** |  | **107,636,760** |  | **118,400,436** |  | **130,240,480** |  | **143,264,528** |  | Ka.Bag Keuangan |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *02* |  |  | 1 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan | | % |  | 90 | 91 |  | 91.5 |  | 92 |  | 92.5 |  | 93 |  | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan perencanaan, pengendalian dan Pelaporan Kinerja |  |  |  |  |  |  |  | **534,110,640** |  | **587,521,705** |  | **646,273,875** |  | **710,901,262** |  | **781,991,389** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *03* |  |  | 2 | Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD | | % |  | 91 | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Perencanaan** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasubag Perencanaan |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *03* | *0* | *1* | Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah |  | 1 | Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Dok |  | 2 | 3 | 106,208,025 | 2 | 116,828,828 | 2 | 128,511,711 | 2 | 141,362,882 | 2 | 155,499,170 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Anggaran dan Perbendaharaan** | | | |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *03* | *0* | *2* | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah |  | 1 | Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah | Dok |  | 2 | 2 | 259,480,515 | 2 | 285,428,567 | 2 | 313,971,423 | 2 | 345,368,565 | 2 | 379,905,422 | 2 |  | Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Pembukuan dan Pelaporan** | | | |  |  |  |  |  | 0 |  | **0** |  | 0 |  | 0 |  |  | Kasubag Pembukuan dan Pelaporan |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *03* | *0* | *3* | Penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah |  | 1 | Jumlah dokumen Penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah | Dok |  | 5 | 5 | 168,422,100 | 5 | 185,264,310 | 5 | 203,790,741 | 5 | 224,169,815 | 5 | 246,586,797 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *02* | *0* | *1* | Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan semesteran,prognosis |  | 2 | jumlah dokumen Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan semesteran,prognosis | Dok |  | 3 | 3 | 25,756,500 | 3 | 28,332,150 | 3 | 31,165,365 | 3 | 34,281,902 | 3 | 37,710,092 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *02* | *0* | *2* | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun |  | 3 | Jumlah dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dok |  | 5 | 5 | 72,095,100 | 5 | 79,304,610 | 5 | 87,235,071 | 5 | 95,958,578 | 5 | 105,554,436 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **47,687,189,550** |  | **52,455,908,505** |  | **57,701,499,356** |  | **63,471,649,291** |  | **69,818,814,220** |  | Ka.Bag Persidangan |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* |  |  | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 1 | Capaian pelaksanaan rencana kerja alat kelengkapan DPRD | | % |  | 90 | 90.5 |  | 91 |  | 91.5 |  | 92 |  | 92.5 |  | 92.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Capaian kinerja persidangan dan Risalah | | % |  | 90 | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Risalah dan Persidangan** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasubag Risalah dan Persidangan |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *1* | Rapat-rapat paripurna |  | 1 | jumlah dokumen Rapat-rapat paripurna | dok |  | 48 | 50 | 97,046,250 | 50 | 102,250,000 | 50 | 112,475,000 | 50 | 123,722,500 | 50 | 136,094,750 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *2* | Kegiatan Reses |  | 2 | Jumlah Kegiatan Reses | dok |  | 3 | 3 | 3,141,594,750 | 3 | 3,945,618,000 | 3 | 4,340,179,800 | 3 | 4,774,197,780 | 3 | 5,251,617,558 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *3* | Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama |  | 3 | Jumlah dokumen Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama | dok |  | 8 | 120 | 1,267,497,000 | 120 | 1,310,000,000 | 120 | 1,441,000,000 | 120 | 1,585,100,000 | 120 | 1,743,610,000 | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Alat Kelengkapan DPRD** | | | |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kasubag Alat Kelengkapan DPRD |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *4* | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan |  | 1 | Jumlah dokumen Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | dok |  | 26 | 32 | 8,165,451,000 | 32 | 8,595,357,750 | 32 | 9,454,893,525 | 32 | 10,400,382,878 | 32 | 11,440,421,165 | 32 |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *5* | Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah |  | 2 | Jumlah dokumen Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | dok |  | 40 | 40 | 397,546,800 | 40 | 437,301,480 | 40 | 481,031,628 | 40 | 529,134,791 | 40 | 582,048,270 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *6* | Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD |  | 3 | jumlah Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | kali |  | 8 | 9 | 6,451,221,000 | 10 | 7,096,343,100 | 10 | 7,805,977,410 | 10 | 8,586,575,151 | 10 | 9,445,232,666 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *7* | Penyusunan Program tahunan DPRD |  | 4 | jumlah dokumen Penyusunan Program tahunan DPRD | Dok |  | 2 | 2 | 835,170,000 | 2 | 828,320,000 | 2 | 911,152,000 | 2 | 1,002,267,200 | 2 | 1,102,493,920 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *8* | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar daerah |  | 5 | jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar daerah | dok |  | 30 | 43 | 12,212,639,250 | 43 | 13,433,903,175 | 43 | 14,777,293,493 | 43 | 16,255,022,842 | 43 | 17,880,525,126 | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Indikasi output kegiatan Perundang-undangan dan Dokumentasi** | | | |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | **0** |  | **0** |  |  | Kasubag Perundang-undangan dan Dokumentasi |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *9* | Pembahasan rancangan peraturan daerah |  | 1 | Jumlah Pembahasan rancangan peraturan daerah | jml |  | 13 | 16 | 13,240,300,500 | 16 | 14,651,140,000 | 16 | 16,116,254,000 | 16 | 17,727,879,400 | 16 | 19,500,667,340 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *10* | Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ |  | 2 | Jumlah laporan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ | dok |  | 1 | 1 | 943,372,500 | 1 | 1,026,815,000 | 1 | 1,129,496,500 | 1 | 1,242,446,150 | 1 | 1,366,690,765 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | *40* | *01* | *11* | *0* | *11* | Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD |  | 3 | Jumlah laporan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPPD | dok |  | 1 | 1 | 935,350,500 | 1 | 1,028,860,000 | 1 | 1,131,746,000 | 1 | 1,244,920,600 | 1 | 1,369,412,660 | 1 |  |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari dalam Belanja tidak Langsung yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Serang . Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Skretariat DPRD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun2020, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel …….

**Tabel.**

Rumusan Rencana Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Belanja BTL** | **Anggaran** | **Keterangan** |
| Rp |
| 5 1. | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | Rp. 4.309.707.550 | - |

**BAB V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kota Serang Tahun Anggaran 2020.

Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Serang adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Sekretariat DPRD Kota Serang.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Serang selain menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan DPRD dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kota Serang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja, hasil kinerja ke arah yang lebih baik dan efisien.

Serang, Juli 2019

Plt. Sekretaris DPRD Kota Serang

**MOH. MA’MUN CHUDARI, SE**

NIP. 19631203 198903 1 006